

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Anisa, Fahima dkk. 2019. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Depok: Rajawali Press.
- Ardani & Amirudin. 2009. *Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2008)*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aschliati, Lilik, Prasetya Irawan, and Bambang Prasetyo. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- Allen, R., & Tommasi, D. 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. France: OECD.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage Publication.
- Daranatha, S. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti dkk. 2019. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Depok: Rajawali Press.
- Henley D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, dan J. Whiteoak. 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control Fourth Edition*. London: Chapman & Hall.
- Hills, Peter & Diana Conyers. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Hsu, P.S. 2004. *Deconstructing Decentralization In China: Fiscal Incentive Versus Local Autonomy In Policy Implementation*. Journal of Contemporary China. Journal of Contemporary China, Vol. 13, No. 40, pp. 567-599.
- Indrawan. 2011. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jones, R. dan M. W. Pandlebury. 2000. *Public Sector Accounting 5 th Edition*. London: Pitman Publishing.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.
- Kumorotomo, W. 2008. *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974- 2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SiLPA dalam APBD di Beberapa Daerah*. Konferensi Administrasi Negara Ke-3 di Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Madjid, Noor Kholis. 2014. *Konsepsi Perencanaan dan Penganggaran*. Bahan Ajar: Materi Diklat Perencanaan dan Penganggaran bagi Kasubbag Umum. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Musgrave, R. A. dan Musgrave, P.B. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Nazaruddin. 2005. *Memahami APBD dengan Benar: Bagaimana Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah*. E-Parlemen DIY.
- Nofriyanto, Triyono dkk. 2019. *Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Vol 7. Jurnal EMBA.
- Oates, W. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. National Tax Journal, 46, pp. 237–243.
- Oates, W., 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature 37 (3), 1120–1149.

- Osrinda, Namira dkk. 2016. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin*. Vol.3 No.3. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Robinson, Marc and J. Brumby. 2005. *Does Performance Based Budgeting Work?. An Analytical Review of the Empirical Literature*. IMF Working Paper 051 210: IMF Washington.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigiro, Benny. 2014. *Responsivitas Anggaran: Peran Partisipasi Publik, Transparansi dan Komitmen Perumus Kebijakan Anggaran (Studi Penyusunan Program dan Alokasi Anggaran APBD Sektor Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2013)*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartina, M. 2021. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Schick, A. 1998. *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*. World Bank Institute Governance, Regulation and Finance Division.
- Shah, A. 2007. *Local Budgeting*. The World Bank: Washington, DC.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Baduose Media.
- Sridarnilawati, dkk. 2021. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2016-2019*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.
- Stone, H., J., Sidel, J. L. dan Bloomquis, J., 1997. *Quantitative Descriptive Analysis*. Di dalam: Gacula, JR., M. C. (ed.). *Descriptive Sensory Analysis In Practice*. Food and Nutrition Press, Inc., Trumbull, Connecticut.
- Todaro, P Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

\_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid I Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2019. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Wasana, Sunu dkk. 2018. *Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul*. Vol 1 Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.

Wiyono, Puji dkk. 2021. *Analisis Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan (Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Tahun 2018)*. Vol.5 No.1. Jurnal Ilmiah MEA.

World Bank. 1998. *Public Expenditure Management Handbook*. Washington D.C: World Bank.

Yin, R. K. 2009. *Case Study Research: Design and Method*. California: Sage Publications.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja di lingkungan pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Berbasis Elektronik.

Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2020.